

Judul : Komisi V soal Nataru, awasi transportasi puncak arus balik
Tanggal : Rabu, 31 Desember 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 4

Komisi V Soal Nataru

Awasi Transportasi Puncak Arus Balik

FOTO: WEB NASCEN DPR-RI



Mori Hanafi

DPR mengapresiasi kelancaran arus mudik Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025-2026 yang aman dan terkendali di berbagai moda transportasi, baik darat, laut, maupun udara. Keberhasilan tersebut dinilai sebagai hasil kerja sama dan kolaborasi lintas sektor.

Anggota Komisi V DPR Mori Hanafi menilai, kelancaran mudik merupakan buah sinergi antara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), aparat keamanan, operator transportasi, serta pemerintah daerah dalam memastikan kesiapan infrastruktur dan pelayanan publik. Diharapkan, konsistensi pengelolaan dan pengawasan tetap harus dijaga hingga seluruh rangkaian arus balik selesai.

"Mengingat puncak arus balik masih diperkirakan berlangsung hingga 5 Januari 2026," ujar Mori dalam keterangannya, Selasa (30/12/2025).

Menurut Mori, penyelenggaraan mudik Nataru tahun ini menghadapi tantangan ganda. Sejumlah wilayah di Sumatera masih dalam proses pemulihan pascabencana. Sementara, Pemerintah dituntut tetap memastikan keselamatan, kelancaran, dan kualitas layanan transportasi berjalan optimal.

"Karena itu, kolaborasi dan kesiapsiagaan seluruh pihak

menjadi kunci agar pelayanan transportasi tetap aman dan berorientasi pada keselamatan masyarakat," tegas politikus NasDem tersebut.

Ia berharap, Kemenhub terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan hingga arus balik tuntas. Komisi V DPR akan menjalankan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan transportasi nasional tetap optimal dan responsif terhadap dinamika di lapangan.

"Pengalaman ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bersama agar kualitas layanan transportasi nasional ke depan semakin baik dan berkelanjutan," tambah legislator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR Bambang Harjo Soekartono menyoroti kebijakan pembatasan operasional truk sumbu tiga ke atas selama periode Nataru. Kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap multiplier ekonomi karena aktivitas industri dan logistik berjalan secara berkelanjutan, termasuk pada masa libur panjang.

Bambang mengingatkan, pembatasan distribusi logistik dapat memicu risiko demurrage atau denda keterlambatan kapal di pelabuhan, terutama pada sektor ekspor dan impor. Dampak lanjutan dari hambatan distribusi tersebut adalah kenaikan biaya logistik yang berujung pada inflasi. "Ketika pengangkutan terhambat, harga barang akan naik dan akhirnya dirasakan langsung oleh masyarakat," ujarnya.

Ia membandingkan kebijakan Indonesia dengan negara lain seperti China, Jepang, dan Malaysia yang tetap mengizinkan angkutan logistik beroperasi saat libur hari besar. Logistik memiliki peran vital dalam menjaga kesinambungan industri dan stabilitas ekonomi. ■ PYB